



HB X: Penataan PKL Urusan Pemkot

Pemprov DIJ Upayakan Win-Win Solution

JOGJA - Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mendorong Pemkot Jogja segera menyelesaikan masalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Malioboro. HB X enggan menanggapi gugatan Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo terhadap wali kota Jogja di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Budhi menggugat wali kota Jogja karena merasa dirugikan dengan keberadaan PKL di Malioboro. Sementara Pemkot Jogja dinilai tak tegas menegakkan aturan penataan PKL. »
↳ Baca HB X... Hal 7

SIAP DIRELOKASI?: Salah seorang PKL di Jalan Malioboro tertidur sambil menunggu dagangannya beberapa waktu lalu.



SETIYAK & KUSUMA/RADAR JOGJA



Maunya tuntutan apa saya nggak mengerti. Ya saya tak bisa komentar. Itu di tingkat dua kok, bukan saya.”

HAMENGGU BUWONO X,
Gubernur DIJ

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>UPT. Malioboro</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. <u>Bag. Hukum</u>	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

HB X: Penataan PKL

Urusan Pemkot

Sambungan dari hal 1
HB X menegaskan, penataan Malioboro merupakan kewenangan Pemkot Jogja. "Maunya

(Budhi, Red) tuntutannya apa saya nggak mengerti. Ya saya tak bisa komentar," ujar HB X kemarin (8/8).
"Itu di tingkat dua (pemkot, Red)

kok, bukan saya," sambungnya. Meski tak mau menanggapi masalah tersebut, HB X menilai gugatan ketua PPM terhadap wali kota Jogja hanya persoalan

miskomunikasi. "Ya didialogkan saja," pintanya.
Sementara itu Sekprov DIJ Gatot Saptadi menyatakan telah berkoordinasi secara intensif dengan

Pemkot Jogja untuk mencari jalan keluar masalah penataan PKL Malioboro. Menurut Gatot, jalan tengah penyelesaian masalah itu tak bisa saklek secara tertulis. "Tapi win-win solution-nya tidak bisa hitam putih," katanya.

Gatot menjelaskan, sejauh ini belum ada solusi yang bisa diputuskan. Alasannya, jika memindahkan PKL, saat ini belum ada tempat untuk relokasi. Lahan bekas Bioskop Indra direncanakan menjadi tempat relokasi PKL.

Namun, proses pembangunan semacam mal PKL di lahan tersebut baru saja dimulai. Karena itu, tidak mungkin PKL dipindahkan dalam waktu dekat ini. "Nanti kami optimalkan dengan sarana yang ada," lanjutnya.

Di bagian lain, adanya tudingan dari PPM bahwa para PKL Malioboro menyalahgunakan lahan milik mereka, Gatot me-

Tapi win-win solution-nya tidak bisa hitam putih."

GATOT SAPTADI,
Sekprov DIJ

nyangsikannya. "Harus dilihat fisik sertifikatnya seperti apa dulu. Kalau bicara *eyel-eyelan* ya itu Sultan Ground," jelasnya.

Terpisah, Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malam Malioboro Sukidi menyesalkan langkah Budhi Susilo yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah PKL di depan toko milik anggota PPM. Sukidi mengklaim, ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. "Kan bisa berembuk cari solusi bersama," katanya.

Menurut Sukidi, keberadaan

PKL di selasar toko sepanjang Malioboro siap ditata, tanpa harus direlokasi. Tinggal bagaimana teknis penataannya, supaya akses pengunjung ke toko-toko tersebut tidak terganggu. Sedangkan para PKL tetap bisa berjualan di kawasan itu.

"Misal dikurangi keluasannya atau bagi PKL yang menempel toko digeser menghadap ke pedestrian," usulnya.

Sukidi mengatakan, relokasi PKL memang akan menyelesaikan semua masalah yang dikeluhkan anggota PPM. Tapi, menurut Sukidi, hal itu bukan satu-satunya jalan keluar dari masalah tersebut. "Kalau tidak ada PKL di Malioboro saya jamin pasti jadi sepi. Karena PKL ini kan sudah jadi ikon pariwisata Malioboro, itu pun kalau semua pihak jujur mengamatinya," klaim Sukidi. (tif/ita/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005